



# REFLEKSI KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PERIODE 2014–2019

**Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany**

Sekretaris Jenderal DPR RI



# Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPR RI



---

Prolegnas 2015-2019 ditetapkan sebanyak 169 RUU dan Prioritas Prolegnas 2015 sebanyak 37 RUU + 2 RUU tambahan (RUU Kebudayaan dan RUU Bea Meterai) serta Prioritas Prolegnas 2016 sebanyak 40 RUU.

---

Tahun Sidang 2014–2015, DPR RI dan Pemerintah menyelesaikan pembahasan terhadap 4 RUU Prioritas dan 14 RUU Kumulatif Terbuka yang terdiri dari: 7 RUU Ratifikasi, 3 RUU APBN, dan 4 RUU Penetapan/Pencabutan PERPU Menjadi Undang-Undang sehingga ada 18 RUU yang telah selesai dibahas.

Tahun Sidang 2015-2016, RUU yang telah selesai dibahas baru sejumlah 6 RUU, yang terdiri dari: 4 RUU Prioritas dan 2 RUU Kumulatif Terbuka.

---

Selain RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas, DPR juga telah mengesahkan 6 (enam) Peraturan DPR RI.



# Daftar RUU Prioritas Yang Telah Selesai Dibahas



NO.	JUDUL RUU	AKD	KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD	Pansus	5 Desember 2014
2	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU	Komisi II	17 Februari 2015
3	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi UU	Komisi II	17 Februari 2015
4	RUU tentang Penjaminan	Baleg	17 Desember 2015
5	RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat.	Pansus	23 Februari 2016
6	RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam.	Komisi IV	15 Maret 2016
7	RUU tentang Penyandang Disabilitas.	Komisi VIII	17 Maret 2016
8	RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK)/judul dlm Prolegnas: RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan.	Komisi XI	17 Maret 2016
JUMLAH = 8 RUU			



# Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Ratifikasi Yang Telah Selesai Dibahas



NO.	JUDUL RUU	AKD	KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA
1	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Demokratik Timor-Leste tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Komisi I	9 Februari 2015
2	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Komisi I	9 Februari 2015
3	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam	Komisi I	9 Februari 2015
4	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Papua Nugini	Komisi I	9 Februari 2015
5	RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Sosialis Vietnam (Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters between the Republic of Indonesia and the Socialist Republic of Viet Nam)	Komisi I	20 Oktober 2015
6	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Polandia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.	Komisi I	17 Desember 2015
7	RUU tentang Pengesahan Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Sosialis Vietnam tentang Peningkatan Kerja Sama antara Pejabat Pertahanan dan Kegiatan Bidang Pertahanan.	Komisi I	17 Desember 2015
8	RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah RRC tentang Kerjasama Aktivitas dalam Bidang Pertahanan.	Komisi I	1 Maret 2016
9	RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerjasama di Bidang Pertahanan.	Komisi I	1 Maret 2016

JUMLAH = 9 RUU

*Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany*



# Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang APBN Yang Telah Selesai Dibahas



NO.	JUDUL RUU	AKD	KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA
1	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015	Badan Anggaran	13 Februari 2015
2	RUU tentang Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014	Badan Anggaran	2 September 2015
3	RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016	Badan Anggaran	30 Oktober 2015

JUMLAH = 3 RUU



# Daftar RUU Kumulatif Terbuka tentang Penetapan Perpu Yang Telah Selesai Dibahas



NO.	JUDUL RUU	AKD	KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA
1	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang	Komisi II	20 Januari 2015
2	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang	Komisi II	20 Januari 2015
3	RUU tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang	Komisi III	24 April 2015
4	RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan	Komisi XI	7 Juli 2015
JUMLAH = 4 RUU			



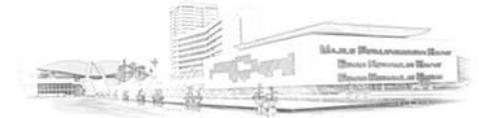
# Daftar Peraturan DPR RI Yang Telah Selesai Dibahas



NO.	JUDUL RUU	AKD	KEPUTUSAN RAPAT PARIPURNA
1	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Pengelolaan Tenaga Ahli dan Staf Administrasi Anggota DPR RI	Baleg	18 November 2014
2	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Kode Etik DPR RI dan Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan DPR RI.	MKD	18 Februari 2015
3	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Perubahan Atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib	Baleg	14 April 2015
4	Rancangan Kerja dan Anggaran DPR RI Tahun Anggaran 2016	BURT	21 April 2015
5	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Pengusulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan.	Baleg	23 Juni 2015
6	Rancangan Peraturan DPR RI tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Nasional.	Baleg	12 April 2016
JUMLAH = 6Peraturan DPR RI			



# Perkembangan RUU



<b>PERKEMBANGAN RUU</b>	<b>JUMLAH RUU</b>
Dalam Proses Pembahasan Tingkat I	15 RUU
Dalam Proses Harmonisasi	2 RUU
Dalam Proses Menunggu Surat Presiden	5 RUU
Dalam Proses Penyusunan di DPR	10 RUU



# Daftar RUU dalam Proses Pembicaraan Tingkat I = 15 RUU



NO.	JUDUL
1	RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.
2	RUU tentang Jasa Konstruksi.
3	RUU tentang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri.
4	RUU tentang Merek.
5	RUU tentang Paten.
6	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
7	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
8	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
9	RUU tentang Kekejarantinaan Kesehatan.
10	RUU tentang Wawasan Nusantara.
11	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.
12	RUU tentang Pengampunan Pajak.
13	RUU tentang Sistem Perbukuan.
14	RUU tentang Kebudayaan.
15	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
<b>JUMLAH = 15RUU</b>	



# Daftar RUU dalam Proses Harmonisasi



**NO.**

**JUDUL**

1 RUU tentang Pertembakauan

2 RUU tentang Jabatan Hakim

**JUMLAH = 2RUU**



# Daftar RUU dalam Proses Menunggu Surat Presiden



NO.	JUDUL
1	RUU tentang Perubahan Kelima Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2	RUU tentang Kewirausahaan Nasional
3	RUU tentang Pertanahan
4	RUU tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan
5	RUU tentang Arsitek
6	RUU tentang Ekonomi Kreatif
JUMLAH = 6 RUU	



# Daftar RUU dalam Proses Penyusunan di DPR



NO.	JUDUL	LINGKUP PENUGASAN
1	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.	Komisi I
2	RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia.	Komisi I
3	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (dalam Prolegnas 2015-2019 tertulis RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara).	Komisi VI
4	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.	Komisi V I
5	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.	Komisi VII
6	RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.	Komisi VII
7	RUU tentang Kebidanan.	Komisi IX
8	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.	Komisi XI
9	RUU tentang Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.	Anggota DPR
10	RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.	Ditunda
<b>JUMLAH = 12 RUU</b>		



# Pelaksanaan Fungsi Anggaran DPR RI



DPR dalam melaksanakan fungsi anggaran telah melakukan:

Pembahasan RUU APBN Perubahan 2015;

DPR berhasil melakukan perubahan atas asumsi makro yang diusulkan pemerintah agar sesuai dengan kondisi ekonomi 2015;

DPR menyetujui peningkatan alokasi anggaran untuk pembangunan antara lain untuk infrastruktur dan kesehatan masyarakat

Pembahasan Realisasi Smt I dan Prognosis Smt II TA. 2015;

DPR mendesak pemerintah untuk optimalkan penyerapan anggaran APBN Perubahan 2015 untuk menjadi stimulus.

Pembicaraan Pendahuluan RUU APBN 2016.

DPR dan Pemerintah telah membahas Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal dan ekonomi Makro RAPBN 2016

Penetapan RUU Perubahan APBN 2015, Pertanggungjawaban dan Pelaksanaan APBN 2014, dan Penetapan RUU APBN 2016



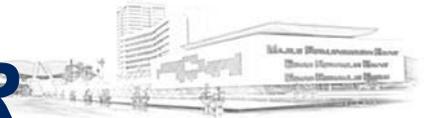
# ***Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPR RI***



Pengawasan DPR dilakukan melalui Raker, RDP/RDPU, kunjungan kerja setiap masa reses, kunjungan kerja spesifik, kunker ke dapil dalam rangka sosialisasi UU dan menampung aspirasi, pembentukan tim/panitia, dan pembentukan panja pengawasan di AKD.



# Daftar Nama Tim/Panitia DPR



NO.	NAMA TIM / PANITIA
1.	Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP).
2.	Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
3.	Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, serta Pelaksanaan UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.	Tim Implementasi Reformasi DPR RI.
5.	Tim Penguatan Diplomasi Parlemen.
6.	Panitia Angket DPR RI terhadap Pelindo II.
<b>Jumlah Tim = 5, Panitia = 1</b>	
<b>Total = 6</b>	



# Pengangkatan Pejabat Publik dan Seleksi Kelembagaan Publik



- Melalui Komisi terkait, DPR RI telah melakukan serangkaian perannya terhadap proses pemberian pertimbangan/persetujuan terhadap pejabat-pejabat publik dengan menggelar *fit and proper test* sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan penetapan pejabat publik yang telah dilakukan oleh DPR RI melalui Komisi terkait selama 2014-2016, antara lain penetapan: Kantor Akuntan Publik, Calon Kapolri, Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia, Calon Hakim Agung, Calon Panglima TNI, Calon Kepala BIN, Calon Anggota Komisi Yudisial, Calon Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dari Masyarakat Profesional Periode 2015-2020 Badan Penanggulangan Bencana, Calon Pimpinan KPK Masa Jabatan 2015-2019, Calon Anggota KY 2015-2020, Calon Anggota Ombudsman RI 2016-2021, Calon Anggota Dewas BPJS Kesehatan, Calon Anggota Dewan BPJS Ketenagakerjaan, Calon Anggota Dewas LPP RRI 2015-2020, dan Calon Kantor Akuntan Publik (KAP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Menteri Keuangan untuk melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPK RI Tahun Anggaran 2015, serta pengangkatan beberapa Calon Duta Besar Negara Sahabat.



# Diplomasi Parlemen



DPR RI telah melakukan pertemuan dengan sejumlah duta besar dan tamu parlemen negara sahabat yang berkunjung ke DPR RI. Diplomasi parlemen yang bersifat bilateral juga dilakukan oleh DPR RI melalui kunjungan ke parlemen negara-negara sahabat.

Untuk kepentingan diplomasi parlemen yang bersifat bilateral, BKSAP DPR RI berencana membentuk 49 (empat puluh sembilan) Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI – Parlemen Negara-negara Sahabat.

DPR RI berpartisipasi dalam sejumlah pertemuan parlemen internasional, antara lain: APA, APPF, AIPA, PUIC, dan IPU.

DPR RI juga telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan *Parliamentary Event on Millennium Development Goals (MDGs) Acceleration and Post-2015 Agenda* di Surabaya tahun 2014, dan *Parliamentary Conference on the 60<sup>th</sup> Commemoration of the Asia African Conference* di Jakarta pada tahun 2015.

DPR juga telah menerima tamu luar negeri selama tahun 2015 sebanyak 52 negara, tahun 2016 sebanyak 31 negara.

DPR juga telah menghadiri *The First Meeting of Speakers of Eurasia Countries' Parliaments* (MSEAP) tanggal 18-22 April 2016 di Moskow, Rusia; *Asia Europe Parliamentary Partnership (ASEP) 9 Meeting* tanggal 21-23 April 2016 di Ulaanbaatar, Mongolia; *Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Social and Cultural Affairs Meeting*, tanggal 26-27 April 2016 di Tehran, Iran; dan *Sidang Global Parliamentary Conference (GPC) of the Parliamentary Networks on the World Banks and the International Monetary Fund* berlangsung pada tanggal 8-14 April 2016 di Washington DC-Amerika Serikat.

**SEKIAN DAN  
TERIMA KASIH**

